

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu

Rozi Efriyanto¹ (beritagame70@gmail.com)*

Helmi Herawati² (helmiherawati77@gmail.com)

Nina Yuliana Sari³ (ninayulianasari26@gmail.com)

^{1,2,3}Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia 38115

*Penulis Korespondensi

Artikel Masuk: 19 Mei 2023 | Artikel Diterima: 5 Juni 2023

Abstract

Financial independence is one indicator of the success of regional autonomy. This study aims to analyze and determine regional financial independence in financial management at the Bengkulu Provincial Government. The type of data used in research is quantitative data. The sample of this research is the regional financial reports of Bengkulu Province from 2017 to 2021. The analytical method used is descriptive research. The results of the study show that the average ratio of the level of independence in Cities and Regencies in Bengkulu Province from 2017 to 2021 is 6.88% at the level of instructive relationship patterns. The average level of regional financial capacity of Cities and Regencies in Bengkulu Province during the 2017-2021 fiscal year period is 100.48% so it is classified as having very good regional financial capacity because this figure is at intervals > 50%. If seen from the average value, it can be seen that the effectiveness ratio of the Cities and Regencies of Bengkulu Province from 2017 to 2021 is 87.91% with a quite effective relationship pattern because it is in the 80-90 interval. The efficiency ratio for the 2017 to 2021 fiscal years is an average of 1,841.87% which reflects inefficient financial performance due to the fact that the total regional expenditure costs are greater than the realization of PAD.

Keywords: financial independence; regional financial management; Bengkulu Province

JEL Classification: E25; R13; H61

Abstrak

Kemandirian keuangan adalah salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kemandirian keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan daerah Provinsi Bengkulu dari tahun 2017 sampai 2021. Metode analisis yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

rata-rata rasio tingkat kemandirian pada kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu dari tahun 2017 sampai 2021 adalah 6.88% pada tingkat pola hubungan yang instruktif. Rata-Rata tingkat kemampuan keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu selama periode tahun anggaran 2017-2021 adalah 100.48% sehingga diklasifikasikan mempunyai kemampuan keuangan daerah yang sangat baik karena angka tersebut berada pada interval $> 50\%$. Jika dilihat dari nilai rata-rata dapat dilihat bahwa rasio efektivitas kota dan kabupaten Provinsi Bengkulu dari tahun 2017 sampai 2021 sebesar 87.91% dengan pola hubungan cukup efektif karena berada pada interval 80-90. Rasio efisiensi tahun anggaran 2017 sampai dengan 2021 dengan rata-rata sebesar 1,841.87% yang mencerminkan kinerja keuangan yang tidak efisien disebabkan total biaya belanja daerah lebih besar dari realisasi PAD.

Kata Kunci: kemandirian keuangan; pengelolaan keuangan daerah; Provinsi Bengkulu

Klasifikasi JEL: E25; R13; H61

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah khususnya mengenai desentralisasi fiskal memiliki tujuan untuk memandirikan pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah tangganya. Melalui otonomi pemerintah daerah diberi kewenangan mengelola sumber daya yang ada dan mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat. Kewenangan dalam desentralisasifiskal berarti adanya keleluasaan untuk menggunakan dana, baik yang berasal dari daerah maupun dari pusat, sesuai dengan keperluan daerahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat, keleluasaan untuk menggali sumber-sumber potensial yang ada di daerahnya, menggunakannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerahnya, dan keleluasaan untuk memperoleh dana perimbangan keuangan pusat-daerah yang memadai yang didasarkan atas kriteria objektif dan adil.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama dalam menentukan derajat kemandirian suatu daerah dan sumber dana utama dalam pembiayaan belanja modal. PAD berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau hasil perusahaan milik daerah. Peningkatan PAD dengan jumlah yang besar diharapkan mampu mendorong akuntabilitas yang lebih, meningkatkan pembiayaan daerah, dan memperkecil ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat (Kustianingsih et al., 2018). Kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2016).

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah juga terlihat dari mampu tidaknya daerah tersebut untuk membiayai belanja daerah tersebut, termasuk di dalamnya belanja modal. Kebutuhan dan kemampuan setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal. Keadaan tersebut mendorong pemerintah pusat untuk mentransfer dana yang disebut dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Transfer dana ini bertujuan untuk mengatasi persoalan dalam hal pelayanan publik yaitu mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah sehingga tercapai kestabilan perekonomian antar daerah (Oktora & Pontoh, 2013). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapakan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian (Halim, 2016).

Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja

daerahnya yang terdiri dari belanja operasi (rutin) dan belanja modal. Jika belanja modal naik maka kemandirian keuangan daerah juga akan naik karena belanja modal lebih besar dibiayai oleh pendapatan asli daerah maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri (Wahyuni & Ardini, 2018). Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut menjadi fenomena dalam penelitian ini, yaitu mengenai kemandirian keuangan pemerintah daerah tersebut meskipun kecenderungan pendapatan asli daerah yang meningkat. Hal ini juga disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi serta masih kurangnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan daerah. Hal lain juga terlihat bahwa meskipun kabupaten sudah berdiri sejak lama namun tingkat kemandirian keuangan dari kabupaten tersebut masih rendah. Penyebab rendahnya kemandirian keuangan tersebut adalah masih tingginya nilai transfer dari pusat yang diterima oleh daerah tersebut. Dana transfer dari pusat dapat berupa DAK dan DAU yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang ada di daerah.

Tingkat PAD sangat berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah karena semakin tingginya PAD yang diterima oleh suatu daerah kemungkinan tingkat kemandirian daerah juga akan meningkat. Meskipun tingkat PAD untuk Provinsi Bengkulu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun namun tingkat bantuan dana dari pusat untuk masing-masing daerah di Provinsi Bengkulu masih dengan persentase yang besar. Hal ini terlihat dari tingginya dana transfer dari pusat. Dana transfer atau dana perimbangan merupakan dana transfer yang bersumber dari dana keuangan pemerintah pusat. Rasio transfer menunjukkan besarnya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pusat. Pada Tahun 2020 rasio transfer Provinsi Bengkulu sebesar 70.07%. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2019 yang mencapai 71.3%. Artinya pada tahun 2020 sekitar 70% penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu bersumber dari dana pusat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kemandirian keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara dokumentasi dari berbagai macam sumber. Data diambil dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan daerah di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 1 kota dan 9 kabupaten, yaitu: Bengkulu Selatan; Rejang Lebong; Bengkulu Utara; Kaur; Seluma; Mukomuko; Lebong; Kepahiang; Bengkulu Tengah; dan Kota Bengkulu dari tahun 2017 sampai 2021. Sampel dari penelitian ini adalah laporan keuangan daerah Provinsi Bengkulu dari tahun 2017 sampai 2021. Sampel ini menggunakan teknik sensus atau jenuh. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini teknik dokumentasi akan diambil dengan cara mengumpulkan data-data yang

dibutuhkan untuk penelitian, seperti laporan keuangan daerah Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 sampai 2021.

Definisi Operasional

Kemandirian keuangan daerah: Pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Kemampuan keuangan daerah: Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan daerah dapat mendukung otonomi daerah (Sularso & Restianto, 2012). Semakin besar rasio kemampuan daerah berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dengan rumus berikut:

$$\text{KKDT} = \frac{\text{TPD}_t}{\text{TBD}_t} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Rasio efektivitas: Bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas dapat dilihat dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli daerah}}{\text{Anggaran Penerimaan Pendapatan Asli daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Rasio efisiensi: Bertujuan untuk menilai apakah sejauh mana efisiensi pemerintah dalam merealisasi pendapatan. Rasio efisiensi pendapatan dapat dilihat dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pengukuran terhadap kemandirian keuangan daerah menggunakan rasio kemandirian keuangan dengan cara membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan dari pihak eksternal. Tingkat kemandirian daerah pada kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tingkat Kemandirian Daerah pada Tahun 2017-2021

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata	Pola Hubungan
		2017	2018	2019	2020	2021		
1	Bengkulu Selatan	6.20	7.35	7.95	8.57	7.43	7.50	Instruktif
2	Rejang Lebong	10.81	8.03	6.98	6.98	6.91	7.94	Instruktif
3	Bengkulu Utara	6.08	10.23	5.85	6.56	8.01	7.35	Instruktif
4	Kaur	4.49	5.15	3.96	6.84	3.62	4.81	Instruktif
5	Seluma	3.15	6.50	6.60	7.30	3.91	5.49	Instruktif
6	Mukomuko	9.05	10.10	8.64	9.65	6.28	8.74	Instruktif
7	Lebong	3.09	5.31	3.76	2.93	2.48	3.51	Instruktif
8	Kepahiang	4.35	5.04	4.96	5.16	4.48	4.80	Instruktif
9	Bengkulu Tengah	3.24	3.16	2.88	3.08	3.05	3.08	Instruktif
10	Kota Bengkulu	15.15	16.67	16.16	14.37	15.32	15.54	Instruktif
	Rata-Rata	6.56	7.75	6.77	7.15	6.15	6.88	Instruktif

Catatan: hasil penelitian dan data diolah.

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa untuk rata-rata rasio tingkat kemandirian pada kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu dari tahun 2017 sampai 2021 adalah 6.88% pada tingkat pola hubungan yang instruktif artinya memiliki penilaian yang rendah sekali. Untuk nilai rasio kemandirian tertinggi adalah di Kota Bengkulu sebesar 15.54%, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 3.08%, sedangkan daerah yang memiliki rasio kemandirian terendah dari sepuluh Kota dan Kabupaten di Provinsi Bengkulu adalah Bengkulu Tengah sebesar 3.08%. Hal ini terjadi karena sumber dari pendapatan daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah yang masih rendah jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lainnya.

Pada tahun 2017 tingkat kemandirian daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 6.56% berada pada interval 0-25% pada penilaian instruktif, jika dilihat dari tahun sebelumnya nilai rata-rata rasio kemandirian daerah untuk tahun 2017 memiliki peningkatan menjadi 6.56%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dari penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2017. Jika dilihat dari rasio kemandirian untuk setiap kabupaten di Provinsi Bengkulu adanya peningkatan rasio pada tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Mukomuko, dan juga Kota Bengkulu. Hal ini dapat dilihat karena adanya peningkatan penerimaan pendapatan daerah untuk kedua kabupaten dan satu kota.

Berdasarkan nilai rasio kemandirian daerah pada tahun 2018 dapat dilihat tingkat kemandirian daerah sebesar 7.75% jika dilihat dari hubungan kemandirian daerah dapat dikatakan bahwa memiliki hubungan yang instruktif. Hal ini menggambarkan bahwa masih tingginya peranan dana dari pusat yang diberikan dari pada yang dimiliki oleh daerah. Namun, jika dilihat dari tahun sebelumnya adanya peningkatan rasio untuk tahun 2018 dari tahun 2017. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan rasio dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bengkulu, pada tahun 2018 ada 3 kabupaten dan 1 kota yang mengalami peningkatan rasio kemandirian daerah yaitu Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Mukomuko dan Kota Bengkulu.

Pada tahun 2019 terjadi penurunan rasio kemandirian daerah menjadi 6.77%, penurunan ini terjadi karena adanya penurunan rasio kemandirian dari Kabupaten

Bengkulu Utara karena turunya PAD yang diterima Bengkulu Utara, yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp71,746,475,000, jauh lebih rendah dari tahun 2018 sebesar Rp117,430,306,000, begitu juga dengan daerah lainnya juga mengalami penurunan penerimaan pendapatan daerah.

Untuk tahun 2020 terlihat adanya peningkatan rasio kemandirian karena pada tahun 2020 tingkat kemandirian daerah sebesar 7.15% meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan rasio untuk Kabupataen Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Mukomuko, dan Kota Bengkulu.

Hal ini menggambarkan bahwa Provinsi Bengkulu masih jauh tertinggal dari provinsi lainnya yang ada di Indonesia karena untuk lima tahun terakhir penilaian rasio kemandirian untuk kota/kabupaten di Provinsi Bengkulu masih terdapat pada hubungan instruktif pada pola hubungan yang sangat rendah. Jika dilihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu terlihat jauh lebih rendah dari provinsi lain yang ada di Indonesia. Jika dilihat dari hasil statistik pendapatan di 34 provinsi yang ada di Indonesia pendapatan yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu masih dibawah rata-rata karena pada tahun 2020 tingkat rata-rata pendapatan provinsi di Indonesia sebesar Rp9,794,698 (dalam jutaan Rupiah), sedangkan Provinsi Bengkulu hanya mampu mengumpulkan pendapatan sebesar Rp2,786,928 (dalam jutaan Rupiah).

Hal ini disebabkan karena rendahnya nilai PAD yang mampu di peroleh oleh masing-masing kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, tingkat pendapatan daerah yang seharusnya lebih besar adalah dari pajak daerah, sedangkan pajak daerah yang mampu dikumpulkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu masih kecil.

Begitu juga dengan sumber PAD yang lainnya masih banyak sumber-sumber PAD yang belum mampu dikumpulkan oleh pemerintah secara maksimal, sedangkan pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet sama sekali belum mampu dikumpulkan oleh pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Nilai kemampuan keuangan daerah yang diperoleh dari perbandingan total pendapatan dengan total belanja daerah, kemudian diukur dengan kriteria kinerjanya, kemudian dibandingkan dari tahun ke tahun. Analisis kemampuan keuangan daerah selama lima tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah pada Tahun 2017-2021

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun					Rata- Rata	Pola Hubungan
		2017	2018	2019	2020	2021		
1	Bengkulu Selatan	102.71	102.84	99.56	97.59	105.73	101.68	Sangat Baik
2	Rejang Lebong	102.86	95.66	93.88	95.84	101.39	97.92	Sangat Baik
3	Bengkulu Utara	100.32	97.61	98.26	99.16	109.98	101.06	Sangat Baik
4	Kaur	97.30	101.62	100.59	95.46	100.31	99.06	Sangat Baik
5	Seluma	102.60	100.63	128.14	97.17	100.73	105.86	Sangat Baik
6	Mukomuko	94.91	95.43	99.35	98.85	108.07	99.32	Sangat Baik
7	Lebong	98.63	98.89	99.89	00.23	102.05	99.94	Sangat Baik
8	Kepahiang	101.15	101.44	99.99	95.14	101.46	99.84	Sangat Baik
9	Bengkulu Tengah	103.14	101.04	99.24	102.60	97.06	100.62	Sangat Baik
10	Kota Bengkulu	101.29	105.88	99.74	84.36	106.39	99.53	Sangat Baik
	Rata-Rata	100.49	100.11	101.86	96.64	103.32	100.48	Sangat Baik

Catatan: hasil penelitian dan data diolah.

Berdasarkan rasio tingkat kemampuan keuangan pada tabel 2 di atas, rata-rata tingkat kemampuan keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu selama periode tahun anggaran 2017-2021 adalah 100.48% sehingga diklasifikasikan mempunyai kemampuan keuangan daerah yang sangat baik karena angka tersebut berada pada interval $> 50\%$. Hal ini menunjukkan bahwa kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu selama periode tahun anggaran 2017-2020 memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengelola anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan sosial. Hal ini menggambarkan bahwa dalam pengelolaan pendapatan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu sudah dikatakan sangat baik karena semua pendapatan yang dimiliki, baik yang bersumber dari PAD maupun yang bersumber dari dana perimbangan, telah digunakan dengan baik untuk belanja daerah.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Kinerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dari perhitungan rasio efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Rasio Efektivitas pada Tahun 2017-2021 (Ribuan Rupiah)

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun					Rata- Rata	Pola Hubungan
		2017	2018	2019	2020	2021		
1	Bengkulu Selatan	89.42	89.25	94.01	99.99	96.12	93.76	Efektif
2	Rejang Lebong	97.87	89.60	91.89	88.07	88.98	91.28	Efektif
3	Bengkulu Utara	93.84	91.39	84.09	90.73	92.83	90.58	Efektif
4	Kaur	97.06	85.54	81.52	78.35	94.21	87.34	Cukup Efektif
5	Seluma	90.27	86.03	84.32	85.34	94.14	88.02	Cukup Efektif
6	Mukomuko	84.89	90.85	85.53	86.48	97.70	89.09	Cukup Efektif
7	Lebong	82.95	81.56	68.91	75.68	91.99	80.22	Cukup Efektif
8	Kepahiang	87.19	83.36	85.58	80.61	90.01	85.35	Cukup Efektif
9	Bengkulu Tengah	83.29	79.74	87.16	80.09	85.19	83.10	Cukup Efektif
10	Kota Bengkulu	87.50	100.13	90.51	74.32	99.38	90.37	Efektif
	Rata-Rata	89.43	87.75	85.35	83.97	93.05	87.91	Cukup Efektif

Catatan: hasil penelitian dan data diolah.

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa pola hubungan untuk rasio efektif adalah pada hubungan efektif dan cukup efektif. Jika dilihat dari nilai rata-rata dapat dilihat bahwa rasio efektifitas kota dan kabupaten Provinsi Bengkulu dari tahun 2017 sampai 2021 sebesar 87.91% dengan pola hubungan cukup efektif karena berada pada interval 80-90.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk aspek rasio efektivitas PAD dapat dikategorikan kedalam kriteria cukup efektif. Hal ini terjadi karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah tidak mencapai yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga harus terus mengoptimalkan penerimaan dari sumber lainnya sehingga diharapkan tidak terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD sehingga dapat melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tarjunajah & Wiratno (2018) yang mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan efektifitas PAD pada pemerintah daerah Jabodetabek, di mana seluruh pemerintah Jabodetabek mempunyai rasio efektifitas yang termasuk dalam kategori efektif dan sangat efektif. Perbedaan hanya pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi terjadi kecenderungan penurunan rasio efektivitas PAD dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2013 dan 2014). Hal ini disebabkan karena rendahnya realisasi penyerapan anggaran pada tahun yang bersangkutan.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi memaparkan terkait perbedaan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dikategorikan efisien bila rasio yang diperoleh dibawah 100%. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang cermat dalam mengestimasi besaran biaya untuk mengaktualisasi pendapatan agar dapat dievaluasi apakah kegiatan pemungutan efisien atau tidak. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan penerimaan pendapatannya sesuai dengan target akan kurang berarti jika biaya yang dikeluarkan untuk memobilisasi pendapatan lebih besar daripada pendapatan yang diterima sebenarnya. Rasio

efisiensi kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Rasio Efisiensi pada Tahun 2017-2021 (Ribuan Rupiah)

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun					Rata- Rata	Pola Hubungan
		2017	2018	2019	2020	2021		
1	Bengkulu Selatan	1,570.37	1,323.16	1,263.50	1,195.43	1,273.19	1,325.13	Tidak Efisien
2	Rejang Lebong	899.35	1,302.60	1,526.91	1,494.30	1,427.52	1,330.14	Tidak Efisien
3	Bengkulu Utara	1,638.75	1,001.01	1,739.09	1,536.73	1,134.64	1,410.04	Tidak Efisien
4	Kaur	2,286.92	1,909.01	2,513.45	1,532.21	2,756.93	2,199.70	Tidak Efisien
5	Seluma	3,097.69	1,527.90	1,182.01	1,409.83	2,537.74	1,951.03	Tidak Efisien
6	Mukomuko	1,164.84	1,037.93	1,164.52	1,047.99	1,473.41	1,177.74	Tidak Efisien
7	Lebong	3,284.13	1,905.18	2,663.27	3,404.06	3,951.28	3,041.58	Tidak Efisien
8	Kepahiang	2,270.32	1,955.69	2,014.76	2,036.86	2,198.82	2,095.29	Tidak Efisien
9	Bengkulu Tengah	2,993.21	3,130.08	3,497.60	3,159.65	3,383.11	3,232.73	Tidak Efisien
10	Kota Bengkulu	651.59	566.46	620.30	824.91	613.38	655.33	Tidak Efisien
	Rata-Rata	1,985.72	1,565.90	1,818.54	1,764.20	2,075.00	1,841.87	Tidak Efisien

Catatan: hasil penelitian dan data diolah.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah kota dan kabupaten Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio efisiensi tahun anggaran 2017 sampai dengan 2021 dengan rata-rata sebesar 1,841.87% yang mencerminkan kinerja keuangan yang tidak efisien disebabkan total biaya belanja daerah lebih besar dari realisasi PAD. Artinya, untuk memobilisasi penerimaan yang maksimal pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Pemerintah Provinsi Bengkulu diharapkan dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan dengan pendapatannya sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah. Penghematan anggaran serta pengalokasian pos-pos anggaran pembiayaan sebaiknya mempertimbangkan skala prioritas untuk mewujudkan kinerja keuangan daerah yang sesuai prinsip *value for money* yang ekonomis, efektif, dan efisien. Butuh program yang konkret agar tingkat efisiensi dapat teratasi terutama dalam kinerja pemerintah daerah terhadap pendapatan maupun belanja daerah.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Tarjunajah & Wiratno (2018) bahwa tidak terdapat perbedaan efisiensi PAD pada pemerintah daerah Jabodetabek di mana seluruh pemerintah daerah Jabodetabek memiliki rasio efisiensi yang tergolong kurang efisien yaitu diatas 90%. Tingginya rasio ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintah Jabodetabek dalam melakukan pemungutan pendapatan masih kurang optimal.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah di kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu dari tahun 2017 sampai 2021 memiliki hubungan yang instruktif atau memiliki hubungan yang masih rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat rasio kemandirian keuangan daerah yang masih berada pada pola hubungan yang instruktif yang berarti pada tingkat kemampuan keuangan daerah masih rendah karena masih tingginya

campur tangan dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil penelitian nilai rasio kemandirian daerah yang dimiliki oleh kota lebih tinggi dari yang dimiliki oleh kabupaten. Hal ini dapat disebabkan karena jumlah pendapatan asli daerah yang diterima oleh kota lebih banyak dari yang diterima oleh kabupaten.

Jika dilihat dari nilai rasio kemandirian yang terendah dari sepuluh kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu adalah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Lebong merupakan kabupaten yang baru pemekaran pada tahun 2003 dari Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan kabupaten termuda yang baru dimekarkan pada tahun 2008.

Rendahnya PAD yang diterima oleh Kabupaten Bengkulu Tengah disebabkan karena tidak semua sumber-sumber PAD yang dapat ditagih oleh Kabupaten Bengkulu Tengah, adapun beberapa jenis PAD yang tidak berhasil dipungut oleh Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut: 1.) pendapatan BLUD dan JKN; 2.) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 3.) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 4.) pendapatan bunga deposito; 5.) pajak air tanah; dan 6.) pajak sarang burung walet.

Begitu juga dengan Kabupaten Lebong, masih banyak jenis PAD yang belum mampu dikumpulkan oleh Kabupaten Lebong seperti: 1.) pajak parkir; 2.) pajak sarang burung walet; 3.) pajak mineral bukan logam dan batuan; 4.) pendapatan bunga deposito; 5.) tuntutan ganti kerugian daerah; dan 6.) pendapatan denda pajak.

Berdasarkan hasil penelitian masih rendahnya tingkat PAD yang diterima oleh masing-masing kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu, salah satu penyebabnya adalah kecilnya jumlah PAD yang mampu dikumpulkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Salah satu pajak yang sering menunggak adalah pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satu solusi yang di ambil oleh pemerintah adalah dengan cara melakukan pemutihan terhadap denda pajak kendaraan bermotor.

Menurut Halim (2016) Pola hubungan instruktif merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus dilakukan dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan.

Menurut Halim (2016) gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui beberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya di samping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan kabupaten lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya. Upaya nyata di dalam mengukur tingkat kemandirian yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi PAD dengan total pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian masih rendahnya rasio kemandirian yang disebabkan karena nilai PAD yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Penyebab hal tersebut adalah karena masih tingginya

ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana pusat. Hal ini dilihat dari masih tingginya dana transfer dari pusat untuk masing-masing daerah di kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu. Dengan tingginya dana transfer dari pusat akan menurunkan kemandirian keuangan daerah karena kebutuhan daerah akan dibiayai oleh dana bantuan dari pusat. Ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pusat ini akan menimbulkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan rasio kemampuan keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu selama periode tahun anggaran 2016-2020 adalah 99.90% sehingga diklasifikasikan mempunyai kemampuan keuangan daerah yang sangat baik karena angka tersebut berada pada interval $> 50\%$. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah kota dan kabupaten Provinsi Bengkulu sudah sangat baik dalam mengelola pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata rasio tingkat kemandirian pada kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu dari tahun 2017 sampai 2021 adalah 6.88% pada tingkat pola hubungan yang instruktif. Rata-rata tingkat kemampuan keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu selama periode tahun anggaran 2017-2021 adalah 100.48% sehingga diklasifikasikan mempunyai kemampuan keuangan daerah yang sangat baik karena angka tersebut berada pada interval $> 50\%$. Pola hubungan untuk rasio efektif adalah pada hubungan efektif dan cukup efektif. Jika dilihat dari nilai rata-rata dapat dilihat bahwa rasio efektifitas kota dan kabupaten Provinsi Bengkulu dari tahun 2017 sampai 2021 sebesar 87.91% dengan pola hubungan cukup efektif karena berada pada interval 80-90. Rasio efisiensi tahun anggaran 2017 sampai dengan 2021 dengan rata-rata sebesar 1,841.87% yang mencerminkan kinerja keuangan yang tidak efisien disebabkan total biaya belanja daerah lebih besar dari realisasi PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Kustianingsih, N., Muslimin, M., & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6).
- Oktora, F. E., & Pontoh, W. (2013). Analisis hubungan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus atas belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten tolitoli provinsi sulawesi tengah. *Accountability*, 2(1), 1-10. <https://doi.org/10.32400/ja.2337.2.1.2013.1-10>
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2012). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1(2).

- Tarjunajah, T., & Wiratno, A. (2018). Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jabodetabek. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 5(2), 175–187. <https://doi.org/10.35838/jrap.2018.005.02.16>
- Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(6).